

ABSTRAK

Noor Hifzi Yati, 2025. *“Pemantauan dan Evaluasi Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Gadang di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata kunci: Pemantauan, Evaluasi, Pengelolaan Sampah, TPS Kampung Gadang, Peraturan Daerah, Hukum Tata Negara, Siyasah Syar’iyyah.

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terbukti dari tingginya timbunan sampah nasional yang mencapai 21,1 juta ton pada tahun 2022. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau, dan menjadi sumber penyakit. Dalam konteks keagamaan, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak merusak bumi. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai peraturan untuk menangani masalah ini, seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan. Namun, masih ditemukan (Tempat Pembuangan Sementara) TPS yang tidak sesuai aturan, seperti yang terletak di Kampung Gadang kec. Banjarmasin Tengah. TPS ini sering penuh, sampah berserakan hingga ke jalan, menimbulkan bau menyengat, dan bahkan mengganggu lalu lintas serta merusak estetika. Skripsi ini berfokus pada sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap aparatatur Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, petugas TPS, dan masyarakat sekitar, serta observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori pemantauan/monitoring, evaluasi, dan kebijakan publik yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi terhadap TPS Kampung Gadang masih bersifat informal dan belum terstruktur secara sistemik. Meskipun terdapat upaya pemantauan dari petugas kelurahan, pengawas TPS, hingga pihak kecamatan, pelaksanaannya belum didukung dengan indikator kuantitatif, pelaporan tertulis, maupun sistem evaluasi berbasis data. Di sisi lain, keterbatasan teknis seperti minimnya armada pengangkut sampah, rendahnya anggaran pengelolaan, dan lokasi TPS yang tidak strategis turut memperparah efektivitas sistem yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah dalam mematuhi aturan pembuangan sampah, serta dominasi budaya permisif turut menjadi hambatan signifikan. Dalam perspektif teori monitoring dan evaluasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol, koordinasi antarinstansi, dan tidak optimalnya sistem tata kelola persampahan. Dalam konteks Siyasah Syar’iyyah, kegagalan ini merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik (*al-maslahah al’ammah*) yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.